

BAB V

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada Bab 5 akan dikemukakan temuan hasil penelitian berupa wawancara dengan nara sumber yang berusaha menjawab rumusan masalah. Akan disajikan beberapa hasil wawancara yang berhubungan dengan masalah penelitian kemudian diinterpretasikan terhadap data penelitian sesuai rumusan masalah dengan menggunakan kerangka konsep dan teori.

5.1. Fenomena Carok dalam Kontestasi Pilkades Bator 2023

Wawancara dengan tokoh masyarakat:

Pertanyaan: Bagaimana anda menjelaskan peran carok dalam kontestasi pilkades di desa Bator:

“Menurut pendapat saya, carok itu merupakan tindakan terakhir jika usaha perdamaian secara kekeluargaan tidak berhasil dilakukan”

Apakah carok dianggap sebagai bagian dari proses kontestasi pilkades?

“Oh, tidak. Bukan bagian dari pilkades. Namun dalam proses pilkades ada kecemburuan social atau kalau tidak menang kemudian merasa harga dirinya terinjak, malu, namun carok itu bukan bagian dari pilkades”

Apakah ada kasus konkrit yang terjadi di dalam pilkades di desa Bator?

“ untuk pertanyaan ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena itu adalah hal yang sangat privasi dan tidak bisa dipublikasikan secara luas”

Bagaimana masyarakat lokal merespon calon kepala desa yang terlibat dalam carok selama pilkades?

“menurut saya sendiri, ketika kepala desa ikut campur dalam kegiatan carok diakrenakan tidak menang maka oleh masyakat kebanyakan dianggap belum dewasa dalam berpolitik dan belum bisa menjadi pemimpin yang dalam masyarakat, karena kalah menang merupakan hal yang biasa dalam sebuah pemilihan”

Apakah ada norma-norma atau adat local yang mengatur atau menanggapi carok dalam konteks pilkades?

“tidak ada, terkadang ini merupakan bagian dari psikologis personal saja.”

Kebanyakan masyarakat tidak ikut campur dalam urusan carok karena takut karena merupakan hal yang kurang baik”.

Bagaimana tokoh masyarakat berperan dalam menanggulangi kejadian carok yang muncul selama proses pilkades?

“Bagi tokoh masyarakat, dalam menanggapi atau menyelesaikan carok itu kebanyakan adalah dengan cara kekeluargaan dengan mengajak damai antara kedua belah pihak bersama dengan pihak berwajib demi menjaga nama baik dari desa”

Bagaimana pandangan masyarakat tentang integritas dan kredibilitas pilkades ketika carok terjadi?

Banyak hal yang sangat mencoreng integritas calon yang bersangkutan, tidak relevan ketika bakal calon terlibat hanya karena kekalahan”

Apakah ada perbedaan pandangan antara generasi yang lebih muda dengan generasi yang lebih tua terkait peran carok dalam pilkade di desa Bator?

Bagi generasi muda, carok tersebut dianggap sebagai hal yang tidak patut, sangat merugikan ketika masyarakat generasi muda ikut campur dalam kegiatan carok.

Generasi tua seharusnya lebih dewasa dalam menanggapi peristiwa carok tersebut”

Fenomena carok sebagai nilai dan identitas sosio-kultural telah berlangsung sejak era kolonialisasi Belanda di Madura. Carok sebagai bentuk mekanisme resolusi konflik di dalam mempertaruhkan harga diri yang bersifat personalistik berkembang sebagai instrumen pertarungan di dalam status sosial dan politik. Secara ontologis, obyek yang tersaji dalam konteks tradisi carok termniafestasikan pada subyek-subyek lain yang juga merupakan bagian dari komunitas etnis Madura maupun komunitas etnis lain. Sang subyek ketika melakukan pencerapan secara indrawi terhadap obyek (subyek-subyek lain), secara ontologis disebut sebagai kegiatan transenden pengada. Ontologi pengada mensinyalir bahwa pengada lain juga berotonomi-unik dan memiliki keber-arti-an. Epistemologi – yang terkait dengan kajian ontologi, dalam arti di mana ada ontologi, maka sudah bisa dipastikan dimensi epistemologinya pun juga ada– juga berpandangan

sama, bahwa tidak hanya subyek yang mempengaruhi dan mewarnai obyek, tetapi obyek pun dengan muatan “arti” obyektivitasnya akan mempengaruhi dan ikut menentukan struktur subyektif subyek tersebut.

Konsep tersebut secara epistemologis mengindikasikan bahwa proses pencerapan obyek oleh subyek tertentu tidaklah mengimplikasikan subyektivisme. Hal ini sejalan dengan konsep kesadaran pada umumnya yakni kegiatan mental manusia, yang selalu bersifat subyektif-obyektif. Konsep subyektif-obyektif inilah yang mendasari sikap orang Madura untuk saling menghormati dan menghargai orang lain. Pencerapan inderawi orang Madura terhadap orang lain, sebagai obyek yang berotonomi-unik dan memiliki keber-arti-an imanen, telah melahirkan apa yang disebut sebagai karakteristik kultural orang Madura. Karakteristik kultural orang Madura adalah sikap dan perilaku sosial yang dikenal sangat ekspresif dan terbuka. Karakteristik yang lain adalah sikap dan perilaku yang saling menghargai dan mengakui peran serta status sosial orang lain. Kedua karakteristik kultural tersebut tidak dapat dipahami tanpa memahami juga linieritas perilaku, yaitu sikap dan perilaku “*baik akan dibalas dengan sangat baik*”, sedangkan sikap dan perilaku “*tidak baik akan dibalas dengan lebih tidak baik pula, yang bahkan sampai menimbulkan pertumpahan darah*”. Karakteristik kultural ini diperkuat oleh hasil penelitian Latief Wiyata bahwa sikap dan perilaku sosial masyarakat etnik Madura dikenal sangat ekspresif dan terbuka. Karenanya, jika mereka mendapatkan suatu perlakuan yang dianggap tidak adil, secara spontan mereka akan bereaksi. Dengan kata lain, menunjukkan sikap diam (baca: tidak bereaksi menentang) jika mendapatkan perlakuan yang dianggapnya tidak adil adalah tidak lazim dalam kebudayaan masyarakat etnik Madura.¹

Secara struktural, peran dan status sosial, secara hakiki, dimaknai oleh orang Madura sebagai sesuatu yang sangat terkait erat dengan persoalan kapasitas diri seseorang. Kapasitas diri dalam konteks carok terkait erat dengan penguasaan teknik-

¹ A. Latief Wiyata, “Masyarakat Madura dan Interaksi Antar Etnik” dalam Aswab Mahasin dkk (ed.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya di Jawa* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996)

teknik bela diri dan pengalaman melakukan carok, termasuk pula ada tidaknya *nyali* (angko). Kapasitas diri seperti itulah yang merupakan hasil kesepakatan nilai-nilai orang Madura, terutama di kalangan kaum blater (hampir mirip dengan istilah preman), sebagai aspek sosial-budaya, yang akan terus-menerus mengalami proses perubahan. Pengabaian terhadap aspek ini akan selalu dimaknai sebagai suatu sikap dan perilaku yang mengarah pada dua “*akibat*”. Pertama, si pelaku akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu menempatkan diri, terutama sebagai orang yang “*badhâ ajina*” (mempunyai harga diri, dalam konteks kapasitas diri). Seseorang yang tidak mengakui dan menghargai kapasitas diri orang lain, pada hakikatnya ia telah melecehkan dirinya sendiri.

Di dalam pendekatan etno-politik Madura, budaya politik dapat dilihat manifestasinya dalam hubungan antara masyarakat dan struktur politiknya, dan dalam hubungan antar kelompok dan golongan dalam masyarakat itu. Dalam buku “*Civic Culture*” karya Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963) dijelaskan bahwa budaya politik merujuk pada perilaku terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya, serta perilaku diri terhadap sistem tersebut². Karakteristik etnis Madura di atas akan sangat mempengaruhi bagaimana preferensi sikap dan perilaku terhadap sistem politik. Selain juga di Madura sangat kental dengan warisan paternalistik, yang biasanya dipegang oleh para kyai, para kepala desa (klebun) dan para blater.

Konstruksi patron-klien antara klebun, blater dan warga orang Madura yang berada dalam posisi sebagai anggota dalam suatu kelompok tertentu akan memberikan sikap loyal yang luar biasa pada kelompoknya masing-masing manakala ada “*jaminan*” baik bersifat ekonomis, psikologis maupun “*religius*” dari para pimpinannya. Perspektif patronase ini dapat menjelaskan bagaimana sebagian masyarakat Madura masih menggantungkan pilihan politiknya menurut petunjuk dan kuasa dari tokoh kyai, klebun dan blater.

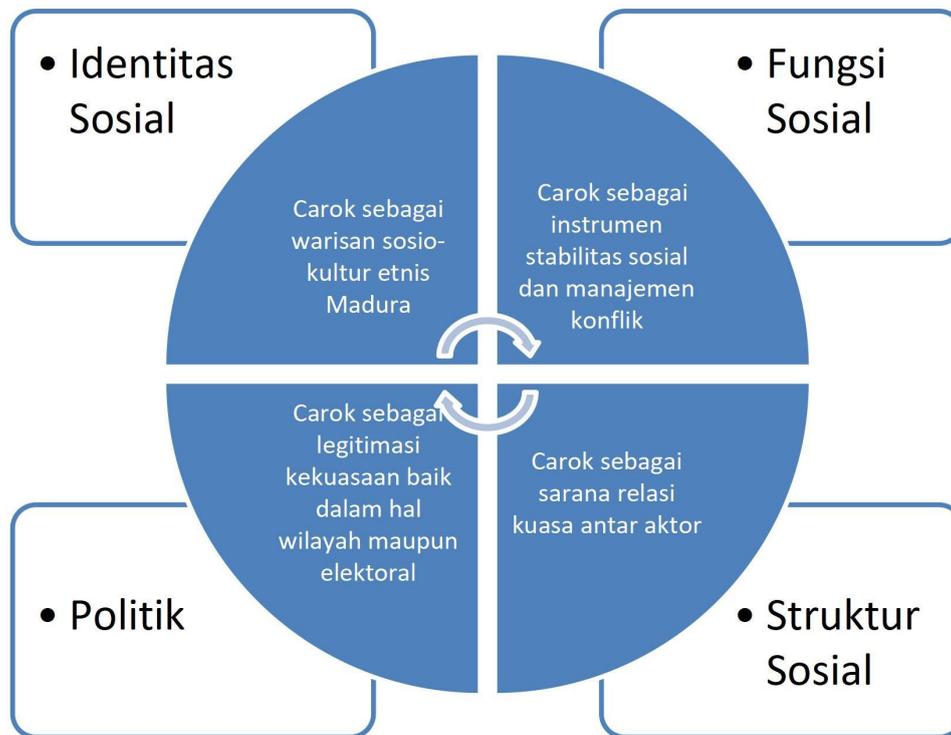
Untuk itu kajian etno-politik berkaitan erat dengan struktur sosial yang

² Almond, Gabriel A, dan Verba, Sidney. 1963. Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara (teri.Sahat Simamora, Civic Culture). Jakarta: Bumi Aksara

menyangkut kepercayaan terhadap nilai dan identitas sosial-kultur. Internalisasi nilai-nilai tersebut terkonstruksi secara alamiah dalam proses yang sangat panjang, berangkat dari dialektika kehidupan sosial turun-temurun. Konteks masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Bagi sebagian masyarakat Madura, ketersinggungan yang menyangkut harga diri diselesaikan dengan melakukan tindak kekerasan berupa carok. Artinya carok adalah ritual pemulihan harga diri akibat intimidasi oleh orang lain, yang berhubungan dengan harta, tahta dan wanita. Namun di dalam perkembangannya, carok menjadi instrumen resolusi konflik sosial dan politik.

Pertama, si pelaku akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu menempatkan diri, terutama sebagai orang yang “*badhâ ajina*” (mempunyai harga diri, dalam konteks kapasitas diri). Seseorang yang tidak mengakui dan menghargai kapasitas diri orang lain, pada hakikatnya ia telah melecehkan dirinya sendiri. Kedua, si pelaku akan dianggap telah melakukan pelecehan kesepakatan nilai-nilai sosial-budaya, berupa ketiadaan pengakuan dan penghargaan, sehingga orang yang bersangkutan merasa *tadhâ’ ajina* (tidak mempunyai harga diri, dalam konteks kapasitas diri), dan akhirnya menimbulkan perasaan *malo*. Dimensi epistemologis tradisi carok ini dalam tahap kedua tersirat makna bahwa orang Madura memahami struktur imanen orang lain, sebagai obyek, dengan bercermin pada struktur imanen dirinya sendiri. Konseptualisasi kemanusiaan orang lain yang mempunyai struktur-ontologis-transendental, yang bipolar, selalu dirujuk pada kemanusiaan dirinya, yang juga berstruktur transendental yang bipolar. Orang Madura yang melakukan tindakan kekerasan, dalam bentuk carok untuk membela harga diri dan kehormatan, baik kerana dipicu oleh kasus-kasus di atas atau yang sejenisnya akan dinilai, dan dipandang memiliki keberanian sebagai seorang *blater*.³ Di sini carok dijadikan sebagai arena legitimasi untuk mengukuhkan status sosial seseorang sebagai seorang *blater*. Jadi identitas keblateran dapat merujuk pada sifat pemberani, angkuh dan punya nyali menempuh jalur kekerasan dalam penyelesaian konflik harga diri.

³ Wiyata, Abdul Latif, 2006, Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Yogyakarta, LKiS



Gambar Diagram Tradisi Carok dari Konsepsi Struktural Fungsional

Menuju Politik

Maka, di dalam perspektif struktural fungsional, carok memiliki posisi sebagai simbolisasi identitas sosial kultur masyarakat Madura yang memiliki seperangkat nilai historis, sosial dan kekuasaan yang melekat pada upaya pengelolaan konflik, yang awalnya berkaitan erat dengan pembelaan terhadap harga diri yang bersifat personalisasi. Di dalam perkembangannya, carok kemudian menjadi piranti yang menunjukkan identitas kekuasaan dalam skop yang lebih luas, terutama dalam dinamika politik elektoral. Hal tersebut kemudian diidentifikasi sebagaimana berikut: Struktur sosial

Peran Sosial: Carok adalah instrumen interaksi sosial yang terbentuk melalui nilai-nilai dan identitas historis masyarakat Madura dalam upaya pembelaan harga diri melalui konflik fisik secara terbuka.

Hierarki: Carok terbentuk melalui proses panjang sejarah masyarakat Madura yang dipraktikkan melalui kekerasan dalam mempertaruhkan harga diri oleh aktor sosial tertentu yaitu blater. Di dalam perkembangannya, carok menunjukkan dan membentuk struktur sosial antara blater dan penguasa lokal seperti *klebun*, tuan tanah, tuan ekonomi dsb.

Fungsi sosial.

Regulasi Sosial: Carok menjadi instrumen dan pranata sosial dalam mengelola konflik yang menyangkut pembelaan terhadap harga diri Ekspresi Identitas: Carok adalah simbolisasi sosial-kultur yang berkelindan dengan nilai dan identitas masyarakat Madura yang terbuka, keras dan egaliter.

Norma dan Nilai.

Norma Budaya: Carok menjadi nilai dan identitas budaya yang berkaitan dengan nilai dan kepercayaan etnis Madura

Norma Tradisional: Carok tumbuh dan berkembang secara turun-temurun berdasarkan nilai dan identitas masyarakat Madura dalam perlawanan terhadap eksploitasi harga diri, yang di dalam awal mulanya terhadap kolonialisasi Belanda.

Dampak Sosial Politik

Sosiologis: Carok adalah interaksi sosial masyarakat Madura dalam mengelola konflik melalui kekerasan.

Politik: Carok berkembang menjadi instrumen dan legitimasi politik dan kekuasaan terutama menyangkut pertarungan jabatan-jabatan politik di dalam dinamika elektoral.

Relasi kuasa yang terbentuk juga bisa menjelaskan terkait konteks kasus carok di Desa Bator yang dilakukan sekelompok orang dari partisan Kades Bulungan sebagai wujud bagaimana relasi patronase itu bekerja. Carok sebagai nilai dan identitas budaya Madura menjadi instrumen kekerasan oleh sekelompok orang terhadap bakal calon Kades Bator, karena tidak ingin adik dari Kades Bulungan yang maju menjadi kontestan Pilkades Bator menjadi tersaingi.

Di dalam konteks studi kasus carok dalam Pilkades Bator 2023, menunjukkan bahwa budaya carok telah bertransformasi ke dalam ruang dan struktur politik, sehingga carok menjadi legitimasi kekuasaan. Operasinya struktural fungsional di dalam konteks politik elektoral Pilkades melibatkan konfigurasi peran kelompok elit. Secara spesifik di Madura, terdapat beberapa tipologi elite lokal, seperti, *blater*, kiai, *Klébun* (kepala desa), *Aria/Sentana*

(bangsawan), Birokrat, Politisi lokal, cendekiawan, *oréng sogi*, *tauke*, *juragan*, dan

bandol.³¹ Masing-masing tipologi elite tersebut mempunyai peran sosial yang penting di masyarakat. Bahkan beberapa diantaranya juga berperan penting dalam tegaknya demokrasi di aras lokal. Modalitas yang dimiliki oleh elite juga beragam, yang membawa implikasi pada kokohnya bangunan kekuasaan dan mampu menjadi instrumen untuk menggerakkan massa dalam proses sosial

³¹ Touwen-Bouwsma, Elly, 1989, “Kepala Desa Madura; Dari Boneka ke Wiraswasta”, dalam, Huub De Jonge (ed),

Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi; Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura, Jakarta, Rajawali

Press.

Lihat juga Kuntowijoyo, 2002, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris; Madura 1850-1940*, Yogyakarta, Matabangsa.

tertentu. Bahkan secara sosiologis, semua elite juga mempunyai basis massa dalam masyarakat akar rumput.

Dihimpun dari media massa Radar Madura bahwa awal peristiwa carok berangkat dari mantan Kepala Desa (Kades) Bator Imin datang ke kantor DPMD Bangkalan bersama M.

Mayyis Abdullah dan Amil. Mereka hendak memenuhi panggilan Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) Bangkalan. Di sekitar kantor DPMD Bangkalan ada pendukung pihak calon Kades (cakades). Rombongan Imin merasa tidak aman sehingga menuju Polres Bangkalan untuk meminta pengamanan. Sementara M. Mayyis Abdullah dan Amil yang mengendarai mobil berbeda berhenti dan menunggu di sisi timur kantor DPMD. Setelah sekitar satu jam rombongan Imin kembali menuju DPMD dengan pengawasan polisi, M. Mayyis Abdullah dan Amil diserang dan dianiaya sekelompok orang yang di aktori oleh Kepala Desa Bulung.⁴

⁴ Kades Aktif dan Mantan Kades di Bangkalan Terlibat Kasus Pembunuhan - Radar Madura (jawapos.com)

“aksi (carok) dilakukan Gosi (Kades Bulung) karena tidak ingin adiknya tersaingi, ya namanya blater ya carok akhirnya, karena Imin, mantan Kades Bator dianggap kuat”³⁴

Fenomena carok dalam kontestasi Pilkades Bator menunjukkan bahwa adanya persaingan relasi kuasa antara penantang dan petahana, yang di dalam konteks ini penantang adalah Gosi, Kades Bulung, yang adiknya Fathur Rosi mengikuti kontestasi Pilkades Bator berhadapan dengan petahana, Imin. Fathur Rosi sendiri adalah salah satu tokoh yang sejatinya memiliki pengaruh di desa Bator. Sedangkan Imin, mantan kades Bator, adalah tokoh kuat yang memiliki relasi sosial yang juga kuat di masyarakat Desa Bator. Persoalannya, Imin sendiri sebenarnya tidak lolos administrasi sebagai calon kepala desa Bator, sehingga aksi carok terhadap pendukungnya pun sejatinya tidak perlu terjadi. Namun sampai penelitian ini berlangsung, peneliti berasumsi bahwa ada motif lain selain kontestasi politik, yang terkait dengan pertarungan harga diri antara kubu Fathur Rosi dan Imin.

5.2. Alasan Munculnya Carok dalam Kontestasi Pilkades 2023

Hasil wawancara mengenai alasan terjadinya carok dalam pilkades di desa Barot Tanya:

Bagaimana awal proses kegiatan pilkades di desa Bator hingga terjadi konflik di dalamnya?

“..yang saya ketahui bahwa ada dua tokoh dari desa kubuh dan desa Bator yang sama sama punya pengaruh. Mayis dan tokoh. Dua orang ini ada pada kubuh desa Buluh. Dua orang ini punya dendam sebelumnya, namun dalam lingkungan keluarga. Masalah pribadi. Maka ada keinginan untuk saling menghilangkan nyawa” akhirnya terjadi carok dan Mayis tewas terbunuh... dari pihak Mayis ini sebenarnya ingin ada perubahan karena dianggap dinasti.”

Secara sosiologi politik, peristiwa kasus carok dalam kontestasi pilkades menarik untuk ditelaah karena ini membuktikan adanya pergeseran nilai dan identitas carok yang dulunya sebagai instrumen resolusi konflik melalui pertarungan terbuka antar pelaku untuk mempertaruhkan harga diri mulai berkembang sebagai sarana pertarungan

kekuasaan politik. Kontestasi pilkades yang mempertaruhkan posisi *klebun*, sebagai strata sosial yang tinggi di masyarakat Madura menjadi ruang pertarungan yang tidak sekedar jejaring sosial dan politik namun juga nyawa. Kontestasi pilkades tidak sekedar pertarungan gagasan dan wacana politik

Saudi, 55, warga Dusun Sondang, Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Bangkalan. Shamsul, 41, warga Dusun Gua, Desa Bantean, Kecamatan Klampis, Bangkalan; Abd. Rochman, 45, warga Dusun Laok Saba, Desa Bator, Kecamatan Klampis, Bangkalan; Moh. Helmi Harisandi, 32, warga Dusun Batan, Desa Bator, Kecamatan Klampis, Bangkalan; dan Juhari, 52, warga Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

³⁴ Wawancara dsengan beberapa warga inisial AB. Desember - Januari 2023.

namun juga harga diri dan wibawa untuk memperebutkan status *klebun*, yang dianggap sebagai *raja kecil*. Bagi petahana, akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan posisi tersebut, sedangkan bagi oposisi akan merebut melalui segala cara, termasuk bertarung melalui carok.

Hal ini menunjukkan makna carok yang terinternalisasi ke dalam sistem sosial dan budaya melalui struktur kehidupan masyarakat Madura selama turun-temurun, sebagai identitas sosial dalam memperjuangkan harga diri telah bertransformasi sebagai instrumen untuk mempertaruhkan kekuasaan. Struktur sosial beralih kepada struktur politik. Perubahan secara struktur fungsional ini menjadi sebuah kajian menarik terutama di wilayah Kabupaten Bangkalan. Terlepas dari kasus di Desa Bator, sejatinya banyak dijumpai kasus carok ketika menghadapi pilkades. Mengutip dari ungkapan Sosiolog UTM, Iskandar Dzulkarnain yang mengatakan bahwa;

*“Politik tingkat desa di Bangkalan memang sangat memicu perpecahan. Calon kepala desa yang maju, juga memiliki jaringan kuat. Ini yang membuat sekali terjadi konflik, terus berlanjut.”*⁵

⁵ <https://www.beritasatu.com/nusantara/1050216/motif-politik-carok-massal-dan-pilkades-tanah-merah-laok-yangmelebihi-pilpres> Diakses Desember 2023

Temuan menarik dari lembaga penelitian CSWS (*Center for Security and Welfare Studies*) Universitas Airlangga pada tahun 2021 yang melakukan kajian pemetaan alternatif sosial budaya carok dengan memusatkan pada beberapa kasus di empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) mendapatkan temuan bahwa carok yang disebabkan oleh tema gender sebagai faktor utama. Perspektif yang digunakan adalah Teori Kekerasan dari J. Galtung dan teoretisi sosial lain serta lensa gender untuk melengkapi analisis atas temuan data.

Menariknya adanya temuan kekhususan carok yang disebabkan oleh aktor yang mengejar kepentingan politik juga mendapatkan porsi analisis yang memadai. Aktor-aktor yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) menjadi temuan menarik dari kajian carok ini.

Di dalam konteks fenomena carok dalam Pilkades Bator ini menunjukkan bahwa carok mengalami transformasi menjadi simbol kekerasan terhadap proses politik elektoral lokal. Relasi kuasa antara klebun dan blater dalam melakukan aksi carok terhadap pesaing kandidasi menunjukkan bahwa politik tidak sekedar kontestasi kekuasaan secara demokratis namun juga sudah menyangkut fisik. Berdasarkan tinjauan pemberitaan di media massa bahwa ada tiga korban merupakan warga dari Desa Bator, Kecamatan Klampis, sebagaimana berikut

“menjelang Pilkades di Desa Bator memang sempat terjadi aksi pembacokan hingga korban meninggal dunia. Ada tiga orang yang dibacok, hingga satu diantaranya meninggal dunia, yang notabene pendukung salah satu kandidat kepala desa. Ketiganya adalah pendukung salah satu bakal calon di pemilihan kepala desa (Pilkades). Percobaan pembunuhan ini terjadi Jalan Raya Halim Perdana Kusuma atau 50 meter kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Saat itu korban usai menggelar demo di depan kantor DPMD. Saat sepulang demo tersebut, ketiga korban kemudian dihadang pelaku yang

menggunakan kendaraan roda 4. Pelaku langsung menyabetkan senjata tajam.”⁶

Sedangkan pemberitaan yang kemudian beredar bahwa pelaku utama adalah Kepala Desa Bulungan. Sedangkan korban adalah Mayis dan Amiludin, pendukung calon kepala desa lain yang terkena pembacokan di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma atau 50 meter di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan pada Rabu (5/4/2023). Motifnya adalah tidak ingin adiknya tersaingi oleh korban dalam kontestasi Pilkades Bator, sebagaimana berikut;

“Menurut AKBP. Wiwit Ari Wibisono menuturkan. Ketujuh orang pelaku diketahui berinisial, G, Tm, S,S,Ar,Meh, J, warga Desa Bulung Kecamatan Klampis Kabupetan Bangkalan. Pasca kejadian pembacokan akibat perselisihan tahapan pemilihan kepada desa, petugas menangkap seorang pelaku G salah satu kelapa Desa Bulung Bangkalan, yang menghadang kendaraan korban hingga terjadi pembacokan.”⁷

Jika ditelusuri mendalam, aksi carok terhadap lawan politik dalam kontestasi Pilkades di Madura adalah bentuk relasi yang mentautkan sosio, ekonomi dan kultural antara *klebun*, *blater* dan *juragan*⁸. *Klebun* biasanya adalah petahana atau kepala desa aktif, yang tidak ingin kekuasaan politiknya terancam oleh kandidat lain. Sehingga

⁶ Aksi Brutal Pembacokan Berbuntut Batalnya Pilkades 2 Desa di Bangkalan (detik.com). Link berita diakses <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6711418/aksi-brutal-pembacokan-berbuntut-batalnya-pilkades2-desa-di-bangkalan>

⁷ <https://madu.tv/polisi-tetapkan-tujuh-tersangka-tragedi-carok-dalam-tahapan-pilkades-di-bangkalan/>Diakses pada Desember 2023

⁸ Dibeberapa kasus terkait relasi kuasa patronase ditemukan konfigurasi kekuasaan berdasarkan semakin berkembangnya kalangan elit-elit berpengaruh disamping elit kyai diatas yaitu Juragan, Blater, Klebun, Jagoan Cendekiawan, Politisi Lokal, Birokrat dan sebagainya. Keberadaan elit-elit diatas tentu memiliki dimensi kekuasaan yang berbeda, jika para juragan memiliki orotitas kekuasaannya pada sector ekonomi maka lain halnya dengan kalangan jagoan, blater maupun bajingan yang otoritas kekuasaannya diperoleh melalui tindakan intimidatif dan respresif kepada masyarakat. Meski kultur premanisme, banditisme dan jagoanisme berseberangan dengan prinsip moral dan nilai demokrasi namun dalam realitas politik lokal fenomena tersebut sangat usah kita abaikan fakta-fakta perilaku banditisme didalamnya.

Beberapa ulasan terkait bisa dilihat pada tulisan Bottomore, T.B, (2006). Elit dan Masyarakat. Jakarta: Akbar Tanjung Institute. De Jonge,H (1995). Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Yogyakarta: LkiS. Haryanto, (2005), Kekuasaan Elite: Suatu Bahasan Pengantar, PLOD UGM, Yogyakarta.Kuntowijoyo (2002). Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940. Jakarta: Mata Bangsa. Laswell, Harold D. (2009) Power and Personality. New york : Routledge. Kuntowijoyo (2002). Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940. Jakarta: Mata Bangsa. Laswell, Harold D. (2009) Power and Personality. New york : Routledge.

menggunakan peran blater sebagai eksekutor konflik kekerasan melalui carok. Beberapa temuan lain, perilaku tersebut didukung oleh pemilik modal atau juragan, yang notabene juga tidak ingin kekuasaan dan modal ekonominya terancam oleh pesaing.

Relasi kuasa antar mereka tidak hanya pada bidang penguasaan modal yang bersifat ekonomis sebagaimana melainkan sudah merambah pada sektor penguasaan struktural melalui proses politik dan demokrasi. Bertemunya realitas sosio-kultural masyarakat dengan struktur kekuasaan negara inilah yang menjadikan unsur-unsur premanisme semakin akomodatif dan memiliki elastisitas atau kelenturan sehingga dapat hadir di berbagai posisi kultural dan struktural masyarakat.

Seperti yang telah diulas bab sebelumnya, selain melalui pendekatan struktural fungsional untuk menjelaskan bagaimana fenomena carok menjadi sistem budaya konflik kekerasan Madura yang melegitimasi kekuasaan politik, relasi kuasa antar aktor tersebut menunjukkan pola patronase.

Status sosial dan jagoanisme yang melekat pada diri Bejing menjadi salah satu nilai tambah bagi bejing untuk terjun pada kontestasi politik tingkat desa yaitu menjadi *klebun*. Oleh sebab itu banyak *klebun* di daerah madura yang berasal dari kalangan *Bejing* dengan alasan status sosial dan *jagoanisme* yang dimiliki.

“klebun Bulung dulu memang dikenal blater, seneng carok, namun tidak selalu juga, hanya saja jika sudah menyangkut prinsip dia bisa saja carok.”⁹

Kemudian Imin, mantan Kades Bator yang memang memiliki modal sosial dan politik cukup kuat di Bator. Jika maju lagi dalam Pilkades maka menjadi rival terberat. Meski sejatinya, Imin sendiri tidak lolos administrasi sebagai calon kepala Desa Bator 2023. Namun terlepas dari itu, aksi carok yang terjadi menunjukkan bahwa kontestasi politik yang merebutkan kekuasaan desa atau mengejar identitas *klebun* menjadi pertarungan harga diri. Sehingga aksi carok menjadi bagian dari dinamika struktural budaya Madura yang bertransformasi menjadi instrumen penentu siapa yang layak menjadi penguasa.

⁹ Wawancara dengan salah satu tokoh di Desa Bulung, inisial BG. Januari 2024.

5.3. Implikasi Fenomena Carok dalam Pilkades Bator 2023

Hasil wawancara dalam konteks ini ditemukan fakta:

Apa implikasinya dari carok dalam proses politik ini?

“mungkin dalam pilkades sebaiknya semua mengikuti saja peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tidak perlu membawa-bawa persoalan pribadi dalam pelkades. Jika peraturan dijalankan dan baik dan semua mematuhi maka akan aman-aman saja. Carok dalam pilkades adalah fenomena buruk dalam proses demokrasi.”

Pemilihan kepala desa atau pilkades merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan dalam bentuk sosial, kultural sampai sumber daya ekonomi yang menjadi generator dinamika konflik politik. Penyelesaian isu teknis seringkali dibersamai oleh pengelolaan mobilisasi sumber daya kekuasaan oleh para calon kepala desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya dinamika konflik politik dalam pemilihan kepala desa sering menjadi konflik kekerasan anarkis khususnya di Pilkades Bator Kabupaten Bangkalan 2023. Secara sosiologis, masyarakatnya dikenal karakter ulet dan keras yang memiliki semboyan *“lebih baik putih tulang daripada putih mata”*, memiliki makna lebih baik mati terlihat tulangnya daripada hidup menanggung malu.

Fenomena carok dalam politik bisa disebabkan oleh sejumlah faktor sosial, politik, dan budaya. Di dalam konteks politik modern melalui demokrasi, tradisi carok sendiri merupakan suatu bentuk tradisi kekerasan yang sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Seperti yang diungkap oleh Iskandar dalam kutipan di media massa Beritasatu.com soal fenomena carok dalam pilkades.

“Politik tingkat desa di Bangkalan memang sangat memicu perpecahan. Calon kepala desa yang maju, juga memiliki jaringan kuat. Ini yang membuat sekali terjadi konflik, terus berlanjut. Ada pilkades yang ditunda. Ada yang proses penghitungan suara dipindah ke Pendopo. Tapi ya itu tadi, gejala tidak dapat

dibendung. Carok tetap terjadi”¹⁰

Namun, dalam beberapa situasi, elemen-elemen dari tradisi ini dapat muncul atau dimanipulasi oleh beberapa faktor.

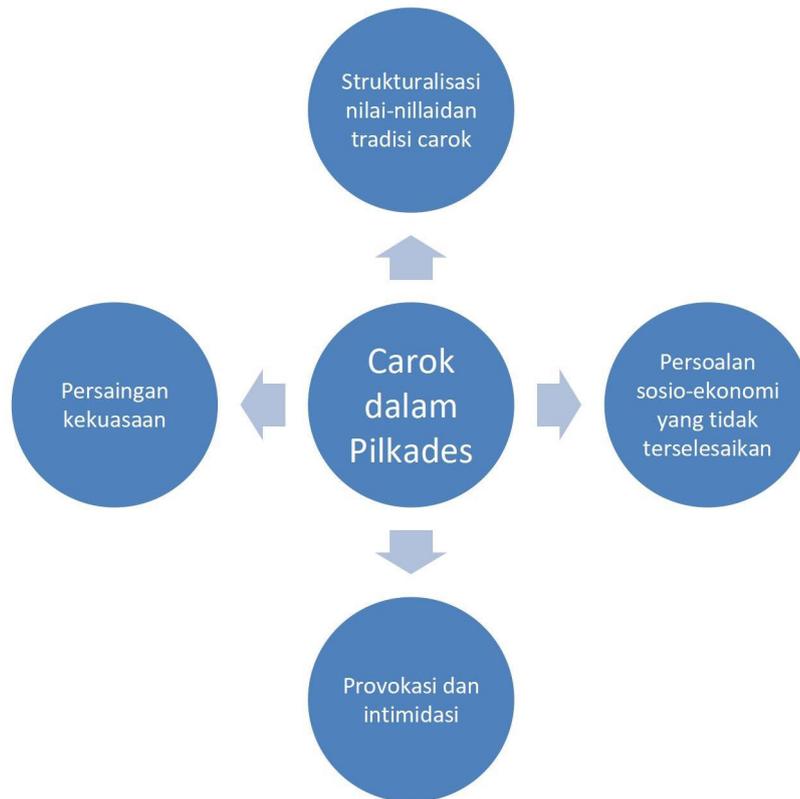
Pertama, adanya ketidakpuasan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat menciptakan ketegangan dan konflik. Politisi atau kelompok politik dapat memanfaatkan ketidakpuasan ini untuk menciptakan ketegangan yang kemudian dapat merujuk pada tradisi carok sebagai bentuk protes atau perlawanan.

Kedua, persaingan sengit antara kelompok politik atau individu dapat memicu konflik. Dalam upaya untuk memenangkan dukungan atau memanfaatkan ketidaksetujuan terhadap pihak lawan, pihak politik dapat menggunakan atau merujuk pada tradisi carok untuk menggalang dukungan atau menunjukkan keberanian dan kekuatan.

Ketiga, polaritas dalam politik, di mana masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan ideologis yang signifikan, dapat menciptakan kondisi untuk terjadinya konflik. Politisi dapat menggunakan atau memanipulasi elemen-elemen tradisi carok untuk menegaskan identitas kelompok dan menciptakan pemisahan antar kelompok.

Keempat, simbolisasi kultural. Elit politik dapat menggunakan identitas budaya atau tradisi lokal, termasuk tradisi carok, sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dan membangun basis politik yang kuat. Politisi atau kelompok politik mungkin sengaja melakukan tindakan-tindakan provokatif atau manuver politik yang melibatkan konfrontasi atau pertikaian fisik. Semua faktor di atas tidak lepas dari kelemahan dalam sistem hukum atau penegakan hukum yang memungkinkan tindakan kekerasan atau intimidasi untuk terjadi tanpa hambatan dapat mempermudah terjadinya fenomena carok dalam politik.

¹⁰ <https://www.beritasatu.com/nusantara/1051123/fenomena-carok-bergeser-sosiolog-dulu-karena-masalah-wanita-kiniperebutan-kekuasaan> Diakses Desember 2023.



Gambar Faktor Adanya Carok dalam Pilkades.

Faktor lain yang terkait dengan adanya fenomena carok dalam pilkades adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta yang tidak kalah urgen yaitu literasi politik demokrasi yang belum menyentuh sepenuhnya di semua lapisan masyarakat. Peran kyai juga sangat penting untuk kemudian meredam fenomena tradisi carok dalam kontestasi politik. Hal ini tentu sangat penting mengingat masyarakat Madura sebagian besar masih terkait relasi kuasa patronase.

Merujuk pada konteks kasus carok dalam Pilkades Bator 2023, Ketua TFPKD Moh. Taufan Zairinsjah mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan masuk dalam kriminal pidana. Fenomena carok di dalam konteks pilkades justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat Madura yang menjunjung tinggi keterbukaan, egaliter dan bersaing yang terbaik. Selain itu peran tokoh masyarakat seperti Kiai sangat penting untuk mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan kekerasan dalam kontestasi pemilu.

“ya kasus tersebut memang menjadi atensi kami, terutama pihak kepolisian dan aparat keamanan untuk melakukan pengamanan ketat mengingat tahapan pilkades masih berjalan. Untuk itu kami menghimbau semua masyarakat untuk

menjaga kondusifitas demi berjalannya pilkades secara baik dan bermanfaat untuk semua.”¹¹

Fenomena carok dalam konteks Pilkades Bator dapat memiliki implikasi serius terhadap stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan di tingkat desa. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin timbul dari keberadaan carok dalam proses Pilkades:

a. Instabilitas Politik

Fenomena carok yang dilakukan oleh elit politik terhadap pendukung kandidat lain menunjukkan bahwa terjadi kondisi politik yang tidak demokratis. Artinya penggunaan kekerasan dalam politik adalah wujud dari ketidakmampuan sistem politik demokratis berjalan, sehingga menyebabkan ketidakstabilan. Kasus carok di Pilkades Bator membuat segala tahapan pemilu menjadi mundur ditengah suasana yang tidak kondusif. Meski kemudian, di dalam perkembangannya pemungutan yang berlangsung tanggal 25 Oktober 2023 dimenangkan secara telak oleh Fatkhur Rosi. Melalui kutipan di media Infojatim.net, Abd.Rohman (Ketua Pemilihan Kepala Desa Bator) menyampaikan bahwa Fathur Rosi keluar sebagai pemenang dengan perolehan 2006 suara, unggul dari Abdul Aziz dengan 37 suara, Istiqomah yang memperoleh 36 suara, dan Nur Hasanah yang memperoleh 7 suara.¹² Namun kemenangan telak Fatkhur Rosi menunjukkan bahwa peristiwa carok membawa implikasi terhadap raihan suara mutlak tersebut

b. Dampak Psikologis: Carok memang telah menjadi identitas budaya dan nilai-nilai masyarakat Madura. Meski kemudian di dalam dinamika kehidupan kontemporer, tentunya peristiwa carok tetap memberikan dampak psikologis terutama bagi masyarakat modern atau menengah. Terutama jika itu terkait konstelasi politik, maka asumsi masyarakat terhadap apapun proses dan hasil pemilu menjadi tidak lagi substansial, bahkan bisa menjadi apatis.

¹¹ Wawancara dengan Ketua TFPKD Kab. Bangkalan, pada bulan Januari 2024.

¹² Pilkades Bator, Fathur Rosi Menang Telak Atas Tiga Kontestan Lainnya - Informasi Online Terpercaya Seputar Jawa Timur (infojatim.net). Diakses Januari 2024

c. Polarisasi masyarakat: Fenomena carok dalam Pilkades Bator menunjukkan tidak sekedar pertarungan individual, sebagaimana carok dipahami secara konservatif. Namun carok menunjukkan ada pembelahan terhadap masyarakat, persoalan pro dan kontra terhadap pilihan-pilihan politik.

d. Penghambatan Pembangunan: Segala konsekuensi tersebut pada akhirnya dapat menghambat upaya pembangunan di desa, karena sejatinya pemilu sebagai media manajemen konflik politik secara modern melalui kompetisi yang demokratis tercederai oleh penggunaan kekerasan yang tidak manusiawi. Untuk itu, masyarakat memandang pemilu tidak lagi melahirkan dialektika gagasan dan narasi pembangunan yang terbaik bagi masyarakat, yang justru terjadi pemilu sebagai ajang pertarungan kekerasan. Maka siapapun yang menjadi pemenang, tidak berangkat dari legitimasi yang demokratis.

Maka kemudian penting untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah carok dalam Pilkades, termasuk membangun dialog dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat serta memperkuat institusi dan norma-norma yang mendukung demokrasi dan ketentraman di tingkat desa.

Untuk melakukan langkah pencegahan terhadap fenomena carok dalam konteks kontestasi politik Pilkades yang bisa menjadi indikator konflik atau perselisihan yang terjadi dalam lingkup politik desa melalui analisis struktural fungsional perlu diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut;

Peran Kelompok Politik: Pilkades selalu membentuk konfigurasi kekuatan politik melalui jejaring sosial, ekonomi dan budaya yang dikendalikan oleh elit. Di dalam konteks ini, maka penting untuk kemudian mengidentifikasi peranan tokoh masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai identitas etnisitas, budaya dan agama serta ekonomi (pengusaha). Bagaimana persepsi dan perilaku politik mereka akan sangat mempengaruhi konstalasi Pilkades, maka ketika fenomena carok sudah dianggap tidak relevan dalam konteks demokrasi modern serta memiliki dampak yang tidak baik, maka perlu membangun suasana politik yang lebih kondusif dan demokratis.

Dinamika Sosial: Selain membentuk relasi kuasa antar elit, Pilkades juga membentuk konfigurasi hubungan sosial antar warga dan kelompok di tingkat desa. Hal-hal yang menyangkut kualitas faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi bagaimana kemudian memandang carok sebagai bagian dari instrumen kompetisi kekuasaan atau justru kontraproduktif. Maka, peningkatan derajat kehidupan sosial - ekonomi menjadi fundamental untuk kemudian meminamlisir penggunaan mekanisme kekerasan dalam kontestasi elektoral.

Struktur Kekuasaan: Identifikasi struktur kekuasaan di tingkat desa dan bagaimana hal ini memengaruhi dinamika Pilkades. Hal ini kemudian untuk menelaah dan menganalisis apakah carok dapat dianggap sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap struktur kekuasaan yang ada. Konteks kasus di Desa Bator, carok terhadap pendukung petahana menjadi salah satu asumsi kuat bahwa ada kritik terhadap kepemimpinan sebelumnya, meski disatu sisi sebagai bentuk pengambilalihan kekuasaan secara kekerasan.